

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. BUKU

- Ana Rokhmatussa'dyah, 2011, Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Pangerang, 2018, *Pokok-pokok Hukum Pemerintah Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Aminuddin Ilmar, 2010, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Busrizalti, 2013, *Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media, Jakarta.
- Kairupan David, 2013, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Salim HS dan Budi Sutrisno, 2008, *Hukum Investasi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siswanto Sunarno, 2021, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suharizal, 2017, *Hukum Pemerintah Daerah*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Sembiring, Sentosa, 2007, *Hukum Investasi*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Sri Soemantri, 2014, *Otonomi Daerah*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Said, 2008, *Arah Baru Otonomi Daerah*, Gramedia, Jakarta.

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal.

Peraturan Badan Koordinator Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 tahun 2021 tentang Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.

### **C. JURNAL**

Ayu Sri Wulan Dari, *"Implementasi Pengendalian dan Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaksanaan Penanaman Modal di Provinsi Bali"*, Jurnal Kertha Negara, Vol. 05 No. 04, 2017.

Ahmad Ma'ruf, *"Strategi Pelayanan Penanaman Modal"*, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol.11, No.1, 2010.

Devy Putri, *"Dampak Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu"*, Jurnal Komunikasi, Vol. 8, No. 2, 2017.

Hendry Keynes, *"Penanaman Modal Asing dilihat dari Perspektif Otonomi Daerah"*. Jurnal Lex et Societatis, Vol.4, No.6, 2016.

Imelda Febriany, “Efektifitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terhadap Penyerapan Investasi di Kalimantan Timur”, Vol.2, No.3, 2014.

Nuria Siswi Enggarani, “Kualitas Pelayanan Publik dalam Perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Boyolali,” Vol.1, No.1, 2016.

Uchaimid Biridlo’I, “Inovasi Pelayanan Perizininan Melalui Online Single Submission (OSS): Studi Pada Izin Usaha di Dinas Penanaman Modal”, Jurnal Administratio, Vol.10, No.2, 2019.

Rini Larono, “Analisa Survei Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Talaud”, Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial, Vol.1, No.1, 2020.

#### **D. WEBSITE**

<https://pmptsp.dharmasrayakab.go.id/profil/2/sekilas-dpmptsp.html>.DPMPTSP Kabupaten Dharmasraya“*Sekilas Tentang DPMPTSP*”. Diakses pada 19 November 2022 Pukul 17:14 wib

<https://dunianotaris.com/kebijakan-ptsp-pelayanan-terpadu-satu-pintu-melalui-pendekatan-sistem.php>, Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Pendekatan diakses pada 28 November 2022, Pukul 10.00 wib.